

## ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI MALUKU

Elsjamina M. Latuny

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura  
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Ambon

### ABSTRACT

*This paper aims to know which sectors that could be a basic sector in regional economic growth in Maluku Province and basic sector in district of Maluku. This research used data from central statistic (BPS) in period 2008-2012.*

*Result shows that there are four basic sector in Maluku Province, agriculture sector; trade, hotel and restaurant sector; transportation and communication sector, also; others service. Meanwhile, in district area, Ambon city, South East Maluku district, East Seram district consistent with still has a four basic sector. There are a four district in this periods of research has an increasing basic sector, Aru Archipelago district, Tual city, South West Maluku district, also Centre Maluku district.*

**Keywords:** *basic sector and location quotient (LQ).*

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab daerah merupakan bagian integral dari suatu negara. Indonesia adalah negara kesatuan di mana rencana-rencana pembangunan meliputi rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan regional. Pembangunan ekonomi mempunyai dampak atas struktur nasional dan struktur ekonomi daerah. Pembangunan daerah dalam buku pegangan penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah (Depdagri, 2007), menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya membangun manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan pembangunan daerah dimaksud sebagai usaha meratakan dan menyebarluaskan pembangunan untuk menyerasikan, menyeimbangkan, serta memadukan seluruh kegiatan. Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor.

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor. Perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama pemacu laju pembangunan di suatu daerah.

Pembangunan ekonomi pada umumnya adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk dalam suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Dengan demikian setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan perkapita masyarakat, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tergantung dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya fisik secara lokal untuk inisiatif pembangunan diwilayah yang bersangkutan (Arsyad, 2004).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan dari pembangunan yang telah dilakukan. Pertumbuhan ekonomi juga berguna untuk menentukan arah pembangunan ke depan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dipengaruhi oleh akumulasi modal, sumber daya alam, sumber daya manusia (*Human Resources*) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro 2000).

Pergeseran paradigma dan sistem penyelenggara pemerintah dari pola sentralisasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saat ini kedua Undang-Undang tersebut sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, membawa implikasi terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah .

Suatu perencanaan pembangunan ekonomi diperlukan penentuan kegiatan-kegiatan di antara sektor-sektor perekonomian. Pada dasarnya masing-masing sektor tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan. Kemajuan suatu sektor tidak akan terlepas dari dukungan yang akan diberikan oleh sektor lainnya sehingga sebenarnya keterkaitan antar sektor ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan seluruh sektor yang terdapat dalam perekonomian. Dengan melihat keterkaitan antar sektor dan memperhatikan efisiensi dan efektivitas yang hendak dicapai dalam pembangunan, maka sektor yang mempunyai keterkaitan tinggi dengan banyak sektor pada dasarnya merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian lebih ( Nazara, 2009 )

Teori ekonomi basis mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Yang dimaksud kegiatan basis adalah kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional (Hendayana, 2003). Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah, sedang kegiatan non basis merupakan kegiatan masyarakat

yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan dan kualitas hidup sangat dalam kegiatan non basis ini.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk yang terus bertambah berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan pendapatan setiap tahun. Hal ini diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun (Tambunan,2001).

Provinsi Maluku berada pada peringkat ke 32 dari 33 provinsi berdasarkan jumlah PDRB yang dihasilkan oleh tiap provinsi di Indonesia, posisi Provinsi Maluku berada di atas Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sebesar Rp 4,8 milyar, apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya secara total sumbangan Maluku sangat kecil terhadap PDB yakni sekitar 0,02 persen terhadap total nasional. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota. Secara sektoral PDRB Maluku cenderung naik. Sektor pertanian paling besar nilainya diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor industri pengolahan; sektor bangunan, dan; sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang paling kecil nilainya yaitu sektor listrik dan air minum. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut.

**Tabel 1. PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012**

SEKTOR	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	1.209.850	1.258.949	1.330.244	1.337.545	1.458.218
Pertambangan & penggalian	27.004	28.071	30.901	33.418	38.201
Industri pengolahan	188.445	201.585	202.399	217.022	234.164
Listrik, gas & air bersih	20.958	17.491	20.305	21.753	23.222
Bangunan	49.848	53.324	78.468	87.239	93.286
Perdagangan, hotel & restoran	971.534	1.029.788	1.094.626	1.167.116	1.282.675
Pengangkutan & komunikasi	407.690	436.237	464.618	490.018	527.268
Keuangan, persewaan & jasa persh	209.645	218.900	224.370	232.184	243.013
Jasa-jasa	702.130	743.443	805.428	873.042	961.320
<b>PDRB</b>	<b>3.797.104</b>	<b>3.992.788</b>	<b>4.251.356</b>	<b>4.507.336</b>	<b>4.861.349</b>

Sumber: Maluku Dalam Angka 2013

Pertumbuhan ekonomi Povinsi Maluku tahun 2012 terjadi penurunan. Secara sektoral di tahun 2012 semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 secara berturut-turut adalah sektor

pertambangan dan penggalian diikuti sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang paling kecil pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku  
Tahun 2008 – 2012 (%)

Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	2,88	4,05	5,66	3,55	5,85
Pertambangan dan Penggalian	4,95	3,95	10,08	8,14	14,3
Industri	4,54	6,97	0,40	7,22	7,89
Listrik dan Air bersih	1,94	-16,5	16,08	7,13	6,75
Bangunan	4,49	6,97	47,15	11,17	6,93
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,32	5,99	6,29	6,62	6,90
Pengangkutan & Komunikasi	4,91	7,01	6,50	5,49	7,60
Kuangan, Persewaan & Jasa Persh	4,27	4,41	2,49	3,48	4,66
Jasa-Jasa	4,60	6,59	7,61	8,39	10,1

Sumber : Maluku Dalam Angka 2013

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor yang dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi.

Struktur ekonomi Provinsi Maluku sejak tahun 2000 didominasi oleh tiga sektor utama. Ketiga sektor tersebut adalah sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa-jasa. Peranan ketiga sektor tersebut pada tahun 2012 secara keseluruhan mencapai 77,90 persen, sedangkan sektor lainnya berkontribusi sekitar 22,10 persen. Kontribusi sektor pertanian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 memperlihatkan kontribusi yang semakin mengecil dan berfluktuasi. Sementara di tahun 2012 sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Sektor apa yang menjadi sektor unggulan yang merupakan basis dalam pertumbuhan perekonomian wilayah Provinsi Maluku.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### Pembangunan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto rill atau pendapatan nasional rill. Perekonomian dikatakan tumbuh berkembang bila terjadi pertumbuhan *output rill*. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan *output*

per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output rill* per orang.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan perekonomiannya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang tercipta disuatu wilayah (Arsyad, 2004).

Todaro dalam Sirojuzilam (2008), mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Menurut Adisasmita (2008), pembangunan wilayah (*regional*) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

### Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-

wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi disuatu wilayah serta *interrelasi*.

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variable ekonomi dari suatu sub sistem *spasial* suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.

Menurut Glasson (1977) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu *endogen* ataupun *eksogen*, yaitu faktor-faktor yang terdapat didalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor diluar daerah atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu *eksogen* adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Sjafrizal, 2008).

Perubahan sistem pemerintahan menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah dan sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam telah berubah menjadi lebih bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi di daerah. Penetapan kebijaksanaan yang sebelumnya hanya sebagai pendukung

kebijaksanaan nasional telah mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah. Kondisi ini juga memicu persaingan antar daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Richardson (2001) perbedaan pokok antar analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang di titik beratkan dalam analisis tersebut adalah perpindahan faktor (*factors movement*). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan *absolute* kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan (Sirojuzilam, 2008).

Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya kedalam sektor dan subsektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustriaan, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa.

Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah.

### **Pendapatan Regional**

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi salah satu alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan regional.

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 1985). Sedangkan menurut Taringan (2007), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*Intermediate cost*). Komponen – komponen nilai tambah bruto mencakup komponen - komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga,sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemuaian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB).

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu :

- 1) Pertanian
  - 2) Pertambangan dan penggalian
  - 3) Industri pengolahan
  - 4) Listrik,gas dan air bersih
  - 5) Bangunan/ Konstruksi
  - 6) Perdagangan,hotel dan restoran
  - 7) Pengangkutan dan Komunikasi
  - 8) Keuangan,Persewaan dan jasa perusahaan
  - 9) Jasa- jasa
2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar harga pasar.

PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin,peralatan,kendaraan,dll) karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan.

3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas biaya Faktor

Jika pajak tidak langsung netto dikeluarkan dari PDRN atas dasar harga pasar, maka didapatkan Produk Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai, dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan.

Perhitungan pendapataan regional metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Taringan, 2007), yaitu :

1. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*).

Pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan regional dengan menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah. Total penyediaan barang dan jasa dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal

tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor netto (ekspor-impor).

2. Pendekatan Produksi (*Production Approach*).

Perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Maka itu, untuk menghitung pendapatan regional berdasarkan pendekatan, maka pertama-tama yang harus dilakukan ialah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor diatas. Pendapatan regional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap sektor.

### Perencanaan Pembangunan Wilayah

Menurut Arsyad (2004), Fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah :

1. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusutan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi.

Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu identitas ekonomi dengan unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktivitas ekonomi wilayah didentifikasi berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu di evaluasi secara komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala wilayah.

Nugroho dalam Sirojuzilam (2008), menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional dititik beratkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan.Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi dipusat dalam melihat aspek ruang disuatu daerah.Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka pendekatan perencanaan *parsial* adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif, pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumberdaya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan public guna

mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

### Teori Basis Ekspor (*Export Base Theory*)

Aktivitas perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yaitu aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan berorientasi lokal yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik *Location Quotient (LQ)*, untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau sektor unggulan (*Leading Sectors*). Teknik analisis *Location Quotient (LQ)* dapat menggunakan variabel tenaga kerja atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan wilayah. *Location Quotient* merupakan rasio antara jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama dengan daerah yang lebih tinggi (referensi).

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk periode tahun 2008 – 2012, sumber antara lain : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku.

### Definisi Operasional Variabel

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar biaya faktor adalah Produk domestik Regional Netto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung netto.

- 3) *Location Quotient (LQ)* merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis sektor potensial atau basis dalam perekonomian di suatu daerah.
- 4) Sektor basis adalah sektor yang mampu mengeksport barang-barang dan jasa-jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada lingkup yang lebih luas, sektor basis ini bila nilai  $LQ > 1$ .
- 5) Sektor Non Basis adalah sektor yang hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri. Bila nilai  $LQ < 1$  maka disebut sektor non basis.

### Analisis *Location Quotient (LQ)*

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di provinsi Maluku digunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)*. Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Provinsi Maluku yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian, sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula yang m dikemukakan oleh Tarigan (2005), sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PNB}} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

- $x_i$  = Nilai tambah sektor i disuatu daerah
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
- $X_i$  = tambah sektor i secara nasional
- PNB = Produk Nasional Bruto atau GNP

Berdasarkan persamaan di atas maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh :

1. Nilai  $LQ = 1$ , ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di provinsi Maluku adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian nasional.
2. Nilai  $LQ > 1$ , ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di Provinsi Maluku lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian nasional.
3. Nilai  $LQ < 1$ , ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor-sektor di Provinsi Maluku lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Nasional.

Apabila nilai  $LQ > 1$ , maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian provinsi Maluku. Sebaliknya apabila nilai  $LQ < 1$ , maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian provinsi Maluku.

Data yang digunakan dalam analisis *Location Quotient* (LQ) ini adalah PDRB provinsi Maluku tanpa minyak dan gas atas dasar harga konstan tahun 2008 – 2012.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu komoditas dengan LQ yang tinggi untuk suatu usaha industri dapat mengandung arti ekonomi lokal memiliki keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) pada kegiatan usaha tersebut. Hal ini memungkinkan suatu peluang pengembangan ekonomi aspek ekonomi atau sinergi yang ada telah membuat komoditas tersebut lebih atraktif terhadap

usaha atau bisnis lokal untuk memenuhi kekurangan dari kebutuhan lokal.

Suatu sektor yang berstatus ekspor dapat merupakan kandidat untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat berperan sebagai pusat kluster sektor ekonomi yang bersangkutan. Dengan mengetahui kluster industri dalam suatu wilayah dengan keunggulan kompetitifnya, maka kita dapat mengerti kekuatan dan tantangan atas ekonomi lokal dan memiliki fokus yang lebih baik untuk upaya melanjutkan pertumbuhan wilayah. Dengan hasil kualitatif dari sektor tersebut, maka kita dapat penjabaran analisis ekonomi wilayah berikut ini meskipun menggunakan teknik *economic base* yang relatif tua dan sederhana namun telah digunakan secara luas untuk menganalisis kinerja ekonomi di berbagai wilayah. Dengan hasil identifikasi kluster sektor ekonomi serta didukung oleh pendekatan kualitatif dari sektor tersebut, maka kita dapat membangun yang lebih baik mengenai hubungan antar sektor ekonomi serta kebutuhan jenis kegiatan potensial dan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan.

**Tabel 3. Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) Provinsi Maluku, 2008 – 2012**

SEKTOR	LQ PROVINSI MALUKU				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	2.337	2.322	2.376	2.391	2.400
Pertambangan Penggalian	0.086	0.085	0.090	0.096	0.108
Industri Pengolahan	0.186	0.193	0.185	0.187	0.191
Listrik, Gas & Air Bersih	0.769	0.557	0.613	0.628	0.634
Bangunan Konstruksi	0.209	0.207	0.285	0.298	0.307
Perdagangan, Hotel & Restoran	1.468	1.525	1.488	1.462	1.423
Pengangkutan & Komunikasi	1.351	1.238	1.163	1.111	1.110
Keuangan,Persewaan & Jasa Prsh	0.580	0.571	0.553	0.538	0.530
Jasa-jasa lainnya	1.999	1.990	2.013	2.067	2.982

Sumber: data diolah

Hasil perhitungan LQ yang diperoleh dengan membandingkan nilai produk domestik regional bruto Provinsi Maluku dengan produk domestik bruto wilayah yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Indonesia, menunjukkan bahwa selama tahun penelitian (2008-2012) terdapat empat (4) sektor basis di Provinsi Maluku yakni sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, dan; sektor jasa-jasa lainnya. Keunggulan sektor pertanian terutama karena kontribusi subsektor perikanan yang sangat besar yakni mencapai 65 persen terhadap total sektor. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang tertata dengan efektif akan berpengaruh positif terhadap peningkatan

output sektor lain yang memiliki keterkaitan dalam hal input-output. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki keunggulan sebagai sektor basis, memiliki *linkage* yang dekat dengan sektor pertanian terutama subsektor perikanan. Sebagai penghasil ikan terbanyak dengan kualitas yang terbaik mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan daerah ini sebagai lumbung ikan nasional, hal ini tentu saja berdampak terhadap volume dan nilai penangkapan ikan, peningkatan volume dan nilai perdagangan dan juga bernilai positif terhadap makanan yang dipasarkan di hotel, restoran dan tempat penjualan makanan lainnya.

Angka indeks LQ di Provinsi Maluku di dominasi oleh empat sektor seperti yang terlihat pada tabel 3,

ha ini dikarenakan keempat sektor tersebut yang paling dominan perkembangannya di antara kabupaten/kota yang ada. Berdasarkan hasil analisis LQ yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Buru, terdapat tiga (3) sektor ekonomi yang memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ) yakni, sektor pertanian; sektor industri pengolahan, dan; sektor bangunan konstruksi. Mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki komoditas dengan nilai ekonomi yang tinggi sehingga apabila diatur dan di tata dengan efisien dan efektif maka akan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap sektor tersebut, juga kepada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan, baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang dalam hal produk yang dihasilkan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah tersebut.
- 2) Kabupaten Buru Selatan, pada kabupaten ini hanya terdapat satu sektor saja yang termasuk sektor basis, yakni sektor pertanian dengan nilai  $LQ > 1$ , yaitu sebesar 2.19 pada tahun 2012. Mengingat kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran baru dari kabupaten induk (Kabupaten Buru) sehingga masih perlu dilakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan pemetaan potensi lokal dan investasi komoditi unggulan, serta keterkaitan produk antar sektor terkait input-output yang memberikan nilai tambah bagi suatu sektor dalam menghasilkan produknya.
- 3) Kabupaten Kepulauan Aru, terdapat dua (2) sektor yang merupakan andalan pada wilayah ini, yakni sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan nilai indeks yang lebih besar dari satu, mensyaratkan bahwa keterkaitan yang cukup dekat antara kedua sektor ini memberikan dampak bagi pengembangan dan peningkatan aktivitas sektor terkait. Salah satu sektor yang juga telah mejadi sektor unggulan atau basis adalah sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki nilai  $LQ > 1$  pada tahun 2010-2012.
- 4) Kota Ambon, terdapat empat (4) sektor yang merupakan sektor basis di wilayah ini karena memiliki nilai  $LQ > 1$ , yakni sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta; sektor jasa-jasa lainnya. Sebagai wilayah ibukota provinsi maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian jelas bukan merupakan sektor basis di wilayah ini.
- 5) Kota Tual, terdapat tiga (3) sektor yang merupakan sektor basis yakni sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih, serta; sektor perdagangan, hotel dan restoran. Terdapat juga satu (1) sektor yang merupakan sektor basis pada tahun 2008-2009, akan tetapi pada tahun 2010-2012 sudah tidak lagi merupakan sektor basis yakni sektor bangunan dan konstruksi dengan nilai  $LQ < 1$ , yaitu sebesar 0,96 pada tahun 2012.
- 6) Kabupaten Maluku Barat Daya, terdapat tiga (3) sektor yang merupakan sektor basis di kabupaten ini, yakni sektor pertanian; sektor bangunan dan konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor basis di daerah ini pada tahun 2011, dimana pada tahun 2012 nilai LQ sebesar 1,04.
- 7) Kabupaten Maluku Tengah, terdapat tiga (3) sektor yang merupakan sektor basis karena memiliki nilai  $LQ > 1$ , yakni sektor industri pengolahan; sektor bangunan dan konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan ada tiga (3) sektor lain yang pada tahun 2011-2012 baru menjadi sektor basis untuk daerah ini karena nilai LQ telah meningkat dan besarnya lebih dari satu, yakni sektor pertanian; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta; sektor jasa-jasa lainnya. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian diharapkan dapat menjadi sektor basis pada periode tahun selanjutnya karena nilai LQ terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan pada tahun 2012 nilai LQ sebesar 0,97.
- 8) Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat empat (4) sektor yang merupakan sektor basis, yakni sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan dan konstruksi, serta; sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor jasa-jasa lainnya berpeluang untuk menjadi sektor basis karena nilai LQ pada tahun 2012 sebesar 0,96.
- 9) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdapat tiga (3) sektor basis di daera ini, yakni sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian, serta; sektor bangunan konstruksi.
- 10) Kabupaten Seram Bagian Barat, terdapat dua (2) sektor basis di kabupaten ini, yakni sektor pertanian, dan; sektor industri pengolahan. Pada tahun 2011, sektor pertambangan dan penggalian telah masuk menjadi sektor basis. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran diharapkan pada tahun mendatang dapat menjadi sektor basis karena nilai LQ cukup besar yakni 0,97.

- 11) Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat empat (4) sektor basis karena memiliki nilai LQ > 1 yakni, sektor pertanian; sektor pertambangan dan pengalihan dimana sektor ini memiliki nilai LQ yang sangat tinggi yaitu sebesar 14,20 pada tahun 2012; sektor industri pengolahan, serta; sektor bangunan konstruksi. Sementara sektor yang nantinya dapat dikembangkan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

#### IV. PENUTUP

##### a) Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Di Provinsi Maluku terdapat empat (4) sektor yang merupakan sektor basis, yakni sektor pertanian (nilai LQ sebesar 2,4); sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,4); sektor pengangkutan dan komunikasi (1,1), serta; sektor jasa-jasa lainnya(2,9).
2. Terdapat tiga (3) kabupaten/kota yang memiliki sektor basis sebanyak empat (4) dengan perkembangan yang tetap artinya memiliki nilai LQ yang konstan pada tahun penelitian, yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Kabupaten/kota dengan tiga (3) sektor basis adalah Kabupaten Buru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru terdapat dua sektor basis, sementara Kabupaten Buru Selatan hanya terdapat satu sektor basis.
3. Terdapat empat (4) kabupaten/kota yang dalam periode penelitian terjadi peningkatan dari sektor non basis menjadi sektor basis, diantaranya: Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tengah.

##### b) Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Terdapat daerah yang memiliki sektor basis yang cenderung kecil jumlahnya, kondisi ini mengakibatkan perkembangan perekonomian daerah yang juga cenderung lambat, sehingga perlu diantisipasi dengan pemetaan potensi ekonomi daerah dan membangun *linkage* antar sektor untuk mengurangi pertumbuhan yang parsial.
2. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mendalam dalam meneliti dan mengkaji potensi sektor dan

komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga sektor dan komoditi yang dikembangkan memang betul-betul yang berkualitas dalam meningkatkan kapasitas penerimaan daerah.

3. Pemerintah daerah terutama masing-masing kabupaten/kota perlu bersinergi satu dengan lainnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan pengembangan wilayah yang lebih menguntungkan terkait dengan perkembangan ekonomi global..

#### REFERENSI

- Adisasmita R**, (2005). Dasar-dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Arsyad, L** (1999). “ Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah “, BPFE, Yogyakarta,1999.
- , 2008. Ekonomi Arehipelago, Graha Ilmu Yogyakarta.
- BPS**. Maluku Dalam Angka, beberapa edisi
- BPS**. Statistik Indonesia, beberpa edisi
- Departemen Dalam Negeri**. (2007) “Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah”, Jakarta.
- Glason, Jhon**, (1990), Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan Paul Sitohang, Jakarta: LPFE UI.
- Hendrayana, Rahmat**, (2003). Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komuditas Unggulan Nasional, Informatika Pertanian, Vol. 13 Desember.
- Kuncoro M**, (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Revormasi,Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta.
- Keppres 44/2002**: Dewan Pengembangan KTI. <http://www.PU.go.id/satminkal/itjen/lama/hukum/keppres44-02.pdf>
- Nazara, Suahazil**, (2005). Analisis Input-Output, Edisi Ke dua, Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rachbini, Didik J**, (2001). Pembangunan Ekonomi dan Sumber DayaManusia. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Richardson, Harry W**, (2001), Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.

- Sjafrisal**, (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Sirojuzilam**, (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*, Pustaka Bangsa Press.
- Sukirno, Sadono**, (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H.** (2001). *Transformasi Ekonomi Di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat. Jakarta.
- Tarigan, Robinson**, (2007). *Ekonomi Regional dan Teori Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Ke Empat, Jakarta.
- Todaro. M.P**, (2006). "Pembangunan Ekonomi" Erlangga, Jakarta, 2006 (Diterjemahan Haris Munandar), Erlangga. Jakarta